

**PENERAPAN PASAL 84 DAN PASAL 85 Jo PASAL 12  
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 DAN KODE  
ETIK PROFESI NOTARIS SEBAGAI BENTUK  
PENDISIPLINAN TERHADAP PELANGGARAN NOTARIS  
(Studi Kasus Putusan MPPN: Nomor 15/B/Mj.PPN/2009)**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan**

**ITA ZALEHA SAPTARIA  
0806427165**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI 2010**

**PENERAPAN PASAL 84 DAN PASAL 85 Jo PASAL 12  
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 DAN KODE  
ETIK PROFESI NOTARIS SEBAGAI BENTUK  
PENDISCIPLINAN TERHADAP PELANGGARAN NOTARIS  
(Studi Kasus Putusan MPPN: Nomor 15/B/Mj.PPN/2009)**

**TESIS**

**ITA ZALEHA SAPTARIA  
0806427165**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI 2010**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Ita Zaleha Saptaria

NPM : 0706176914

Tanda Tangan :

Tanggal : 14 Juni 2010

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Ita Zaleha Saptaria

NPM : 0806427165

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis : Penerapan Pasal 84 dan Pasal 85 Jo Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Dan Kode Etik Profesi Notaris Sebagai Bentuk Pendisiplinan Terhadap Pelanggaran Notaris (Studi Kasus Putusan MPPN: Nomor 15/B/Mj.PPN/2009)

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Ibu DR. Roesnastiti Prayitno, S.H., M.A (.....)

Penguji : Bpk. DR. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H (.....)

Penguji : Bpk. Akhiar Salmi, S.H., M.H (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 01 Juli 2010

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **PENERAPAN PASAL 84 DAN PASAL 85 Jo PASAL 12 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 DAN KODE ETIK PROFESI NOTARIS SEBAGAI BENTUK PENDISCIPLINAN TERHADAP PELANGGARAN NOTARIS (Studi Kasus Putusan MPPN: Nomor 15/B/Mj.PPN/2009)**. Tesis ini disusun guna memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam penulisan Tesis ini, penulis menyadari banyak sekali mendapat bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak baik dalam bentuk moriil maupun materiil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan Tesis ini, yang antara lain:

1. Ibu DR. Roesnastiti Prayitno, S.H., M.A., selaku Pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penulisan tesis ini;
2. Bapak DR. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia;
3. Bapak Batubara, S.H., M.H, selaku Sekretaris Majelis Pengawas Pusat, yang telah memberikan waktu untuk memberikan informasi dalam penulisan tesis ini kepada Penulis;
4. Bapak Piharnop, S.H, selaku anggota Majelis Pengawas Pusat, yang telah memberikan informasi Penulis dalam penyelesaian tesis ini;
5. Ayahanda H. Usman Akip dan Ibunda Hj. Rusminah, yang telah memberikan cinta, kasih sayang, doa dan motivasi yang besar demi terselesainya tesis ini;
6. Kakak-kakak tecinta dan keponakanku, yang telah memberikan doa dan dukungan selama penulis menyelesaikan tesis ini;
7. Sahabat-sahabat tercinta: Amel, Ea, Feby, Vita, Icha, Yana, Mine, Acit, Midonal, Bang Ronald, dan KrisTanto KiKiS atas saran dan kebersamaannya sehingga mampu mendorong Penulis untuk menyelesaikan tesis ini;

8. Ego Ismulyanto beserta keluarga yang selalu memberikan dukungan serta doanya kepada Penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
9. Semua teman-teman Notariat angkatan 2008, yang tidak dapat Penulis sebut satu persatu, serta almamaterku, terima kasih bantuannya selama ini;
10. Seluruh Staf Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Magister Kenotariatan yang telah membimbing Penulis selama perkuliahan.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 01 Juli 2010

Ita Zaleha Saptaria

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ita Zaleha Saptaria  
NPM : 0806427165  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-ekclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PENERAPAN PASAL 84 DAN PASAL 85 Jo PASAL 12 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 DAN KODE ETIK PROFESI NOTARIS SEBAGAI BENTUK PENDISIPLINAN TERHADAP PELANGGARAN NOTARIS (Studi Kasus Putusan MPPN: Nomor 15/B/Mj.PPN/2009)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.  
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 01 Juli 2010  
Yang menyatakan

(Ita Zaleha Saptaria)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	5
1.3 Metode Penelitian.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
<b>2. PENERAPAN PASAL 84 DAN PASAL 85 Jo PASAL 12 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 DAN KODE ETIK PROFESI NOTARIS SEBAGAI BENTUK PENDISIPLINAN .....</b>	<b>9</b>
2.1 Sejarah Singkat Profesi Notaris .....	9
2.1.1 Lahirnya Jabatan Notaris .....	9
2.1.2 Perkembangan Notaris di Indonesia.....	12
2.2 Notaris Selaku Pejabat Umum.....	20
2.2.1 Tugas Dan Wewenang Notaris.....	20
2.2.2 Akta Notaris.....	24
2.2.3 Kewajiban Notaris.....	30
2.2.4 Larangan Notaris.....	32
2.3 Landasan Teori Kode Etik Notaris.....	33
2.3.1 Pengertian Dan Peranan Etika Serta Etika Profesi.....	33
2.3.2 Kode Etik Profesi Jabatan Notaris.....	37
2.4 Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris Selaku Pejabat Umum..	50
2.4.1 Majelis Pengawas Notaris Sebagai Instansi Yang Melakukan Pengawasan, Pemeriksaan dan Menjatuhkan Sanksi Terhadap Notaris.....	50
2.4.2 Dewan Kehormatan INI (Ikatan Notaris Indonesia) Sebagai Instansi Yang Melakukan Pengawasan, Pemeriksaan dan Menjatuhkan Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik Notaris.....	62
2.5 Penerapan Sanksi Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Terhadap Pelanggaran Notaris Sebagai Bentuk Pendisiplinan.....	65
2.5.1 Hakikat Dan Jenis Sanksi.....	65
2.5.2 Sanksi Perdata.....	67
2.5.3 Sanksi Administratif.....	72
2.5.4 Sanksi Lain Yang Dapat Dikenakan Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran.....	79



2.6	Uraian Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: 15/B/Mj.PPN/2009.....	82
2.6.1	Kasus Posisi.....	82
2.6.2	Putusan Majelis Pengawas Pusat Terhadap Putusan Nomor: 15/B/Mj.PPN/2009.....	88
2.7	Analisa Penerapan Pasal 84 Dan Pasal 85 Jo Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Kode Etik Profesi Notaris Sebagai Bentuk Pendisiplinan Terhadap Pelanggaran Notaris (Putusan MPPN Nomor: 15/B/Mj.PPN/2009).....	90
2.7.1	Peranan Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN Dan Kode Etik Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran.....	90
2.7.2	Pertimbangan Majelis Pengawas Pusat Dalam Memutuskan Sanksi Sebagai Bentuk Pendisiplinan Terhadap Notaris.....	93
<b>3.</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>96</b>
3.1	Simpulan.....	96
3.2	Saran.....	97
	<b>DAFTAR REFERENSI.....</b>	<b>98</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Nama : Ita Zaleha Saptaria  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : Penerapan Pasal 84 dan Pasal 85 Jo Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Dan Kode Etik Profesi Notaris Sebagai Bentuk Pendisiplinan Terhadap Pelanggaran Notaris (Studi Kasus Putusan MPPN: Nomor 15/B/Mj.PPN/2009)

Notaris adalah pejabat umum yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan dan kepercayaan dari masyarakat untuk menjalankan sebagian kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis yang otentik dalam bidang hukum perdata. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta memberikan kepastian hukum. Apabila Notaris tersebut dalam menjalankan jabatannya ternyata diketahui melakukan pelanggaran, kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi kliennya, maka Notaris tersebut berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Sanksi Notaris diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN. Dalam UUJN diatur sanksi Perdata dan sanksi Administratif bagi Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut. UUJN tidak mengatur sanksi pidana untuk Notaris. Dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris, Menteri membentuk Majelis Pengawas yang bertugas membantu Menteri dalam mengawasi Notaris meliputi perilaku dan pelaksanaan dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

Kata kunci: Sanksi Perdata, Sanksi Administratif

## ABSTRACT

Name : Ita Zaleha Saptaria  
Study Program : Magister Kenotariatan  
Title : Implementation of Article 84 and Article 85 Juncto Article 12 of Law Number 30 Year 2004 and the Code of Professional Ethics as a form of disciplining Notary Against Notary Violation (Study case on MPPN Verdict: Number 15/B/Mj.PPN/2009)

Notary is a public officer who by law is given the authority and trust of the people to run some power of the State to create an authentic written evidence in the field of civil law. Deed authenticated by the Notary has the power itself of perfect proof and provide legal certainty. If the Notary is found in exercise his job have some fraud or negligence, errors or omissions that causes losses for his clients, then the Notary is obliged by law to account and liability for his actions. Notary sanctions provided in Article 84 and Article 85 UUJN. In UUJN Civil penalties and sanctions provided for the notary who Administrative committed the fraud. UUJN not regulate criminal sanction for the Notary. In supervising the notary, the Minister formed the Supervisory Council of Ministers tasked to assist in overseeing the conduct and execution of Notary included in exercise his job as a Notary if there Notary who has committed a violation of regulations.

Key words: Civil Sanctions, administrative sanctions